



Motivasi Kerja Penyuluh Anti Korupsi

Cahyo Harry Sancoko ¹, Rini Sugiarti ², Fendy Suhariadi ³

^{1,2,3}Universitas Semarang, Indonesia

Email: harrysancoko@gmail.com

Abstract

This study aim to determine the work motivation of anti-corruption instructors in conducting education and campaigns to the public. The backgrounds of Anti-Corruption instructors are very interesting to know more about the work motivation of the Anti-Corruption instructors in carrying out their activities. This study uses a qualitative method, where the informants totaled 5 people who are anti-corruption instructor, who have received certification from LSP KPK. The phenomenological approach strategy was chosen in this study to make a description of the awareness and experience that exists within the individual about a phenomenon. In this study using one variable, Work Motivation. Data collection was carried out through interviews and document study. Interviews were conducted face to face and by telephone. Existing data will be processed and packaged in a descriptive form so that it can answer systematically and logically the problems that have been formulated in the research.

Keywords: anti-corruption, anti-corruption instructor, integrity, integrity values, work motivation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kerja Penyuluh Antikorupsi dalam melakukan edukasi dan kampanye kepada masyarakat. Latar belakang dari Penyuluh Antikorupsi yang berbeda-beda sangatlah menarik untuk diketahui lebih dalam. Terutama motivasi kerja Penyuluh Antikorupsi dalam melakukan aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yang berjumlah sebanyak 5 orang Penyuluh Antikorupsi yang telah mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi. Strategi pendekatan fenomenologi dipilih dalam penelitian ini guna membuat deskripsi tentang kesadaran dan pengalaman yang ada dalam diri individu tentang suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu motivasi kerja. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan study dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung serta melalui telepon. Data yang sudah ada akan diproses dan dikemas dalam bentuk deskriptif sehingga bisa menjawab secara sistematis dan logis masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian.

Kata kunci: antikorupsi, integritas, motivasi kerja, nilai-nilai integritas, penyuluh antikorupsi

Informasi Artikel

Diterima: 01-09-2021

Direvisi: 01-11-2021

Diterbitkan: 01-04-2022



1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena yang tak bisa dilepaskan oleh setiap negara yang ada di dunia (Santoso et al., 2014). Isu korupsi masih menjadi suatu hal yang sangat seksi dan sering dijumpai dalam praktik kehidupan yang ada. Bahkan dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (Kadir & Bunga, 2020). Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar dampaknya bagi masyarakat Indonesia yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas: hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan siapa pun (Pustha & Fauzan, 2021). Tapi karena korupsi yang makin merajalela, semua itu nyata di depan mata kita, dan mirisnya kondisi itu terjadi di negeri kita tercinta, Indonesia. (KPK, 2015). Oleh karena itu korupsi menjadi musuh bersama seluruh negara yang ada di dunia ini.

Bahkan karena sangat berbahayanya korupsi bagi kelangsungan hidup masyarakat tindakan pidana korupsi dimasukkan dalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa (Anjari, 2015). Dimasukkannya tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa menjadi peringatan bagi kita bahwa dampak dari tindak pidana korupsi sangatlah luar biasa.

Korupsi di Indonesia sendiri telah ikut serta dalam perjalanan sejarah di negeri ini. Semenjak negara Indonesia belum lahir, praktik dari korupsi telah mewarnai sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di negeri ini. Mulai dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru dan juga di zaman sekarang yang sering disebut dengan zaman Reformasi ini, korupsi terus berevolusi mengikuti perkembangan zamannya (Joniarta, 2018).

Salah satu hal untuk menilai tingkat korupsi yang terjadi di suatu negara adalah dengan melihat indeks persepsi korupsi yang ada di negara tersebut. Indeks persepsi korupsi akan diukur berdasarkan skala 0 sampai dengan 100. Berdasarkan penelitian dari *Transparency International*, indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2020 sebesar 37, turun tiga poin dibandingkan di tahun 2019 (lihat <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>, diakses pada 28 Januari 2021) artinya masih perlu perjuangan yang cukup keras dalam melawan tindakan korupsi yang ada. Korupsi tidak hanya dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat, namun korupsi juga marak dilakukan pada tingkatan daerah (Guntara, 2020).

Sebagai upaya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia maka dibentuklah suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 3 strategi yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna melakukan upaya pemberantasan korupsi. Ketiga strategi tersebut adalah (1) Penindakan (Represif) adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Tujuan dari strategi ini adalah agar orang takut melakukan korupsi; (2) Edukasi dan Kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan

budaya anti korupsi. Tidak hanya untuk masyarakat umum dewasa dan mahasiswa namun juga kepada anak usia dini, taman kanak-kanak dan juga sekolah-sekolah dasar. Dalam melakukan edukasi dan kampanye ini KPK dibantu oleh Penyuluh Antikorupsi. Tujuan dari strategi edukasi dan kampanye adalah agar masyarakat tidak mau melakukan korupsi; (3) Perbaikan sistem, banyak sistem di Indonesia yang memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan perbaikan sistem misalnya: (a) mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK menerima laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan juga menerima laporan Gratifikasi, (b) memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, (c) memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif.

Guna melakukan pengakuan kompetensi Penyuluh Antikorupsi maka Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi KPK juga melakukan sertifikasi terhadap Penyuluh Antikorupsi. Sebagai mitra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan edukasi dan kampanye tentang korupsi dengan tujuan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi maka Penyuluh Antikorupsi memegang peran penting dalam menyukseskan grand strategi pemberantasan korupsi. Ibarat memberantas sebuah penyakit, maka pemberantasan penyakit tidak hanya bisa dilakukan dengan pengobatan atau melakukan operasi penyembuhan penyakitnya, namun upaya mencegah penyakit itu timbul merupakan hal yang sangat penting. Disinilah usaha Penyuluh Antikorupsi dalam melakukan edukasi dan kampanye kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia menjadi sangat penting.

Meski terkesan kurang “menarik” atau kurang “atraktif”, namun sejatinya pencegahan merupakan terapi yang cukup ampuh dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi melalui pencegahan lebih bersifat “jangka panjang”, karena antara lain terkait dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi dan pembentukan karakter. Hal ini berbeda dengan upaya penindakan, yang lebih bersifat *shock therapy* dan penumbuhan efek jera (Berdasarkan buku KPK, 2015) Dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya Penyuluh Antikorupsi mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Termasuk di dalamnya juga ada yang berprofesi sebagai guru dan dosen.

Peran guru yang sekaligus sebagai Penyuluh Antikorupsi menjadi hal yang cukup penting dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswanya, dengan pendidikan Antikorupsi sejak dini diharapkan nilai-nilai antikorupsi ini bisa menyatu dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Jika pendidikan yang dibangun oleh sekolah bebas dari tindak korupsi maka dapat dipastikan siswa akan meneladani sikap dari pendidik mereka, begitupun sebaliknya jika pendidik dan tenaga kependidikan banyak melakukan tindak korupsi maka di antara siswa pun akan ada yang mengikuti perbuatan tindak korupsi. Apapun profesi yang mereka jalani sebagai Penyuluh Antikorupsi tentunya harus memiliki konsep dan strategi dalam melakukan edukasi dan kampanye pencegahan korupsi (Taja & Aziz, 2017). Ahmad Zuber mengatakan pemikiran mengenai pendidikan berkarakter menjadi sangat penting di tengah upaya penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi. Kurikulum pendidikan anti-korupsi merupakan konsep yang ditawarkan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai-nilai antikorupsi yakni berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab dan sederhana haruslah segera ditanamkan kepada siswa dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi (Zuber, 2018).

Ada 10 *Soft Skill* yang memengaruhi peluang kesuksesan karir seorang siswa yang cerdas berbakat, yakni pembelajaran yang berkelanjutan, orientasi yang benar dan pemikiran futuristik, usaha dan tanggung jawab, pekerja keras, aktif mengajukan pertanyaan, antusias, manajemen diri, getaran positif kepada tim atau teman sekelas, empati, dan menghormati orang lain. Dari ke 10 *Soft Skill* tersebut di antaranya adalah merupakan nilai-nilai antikorupsi (Sugiarti et al., 2018).

Selain itu perkembangan teknologi pun dimanfaatkan oleh Penyuluh Antikorupsi dalam memberikan edukasi dan kampanye terhadap masyarakat. Dengan menggunakan hasil dari perkembangan teknologi misal dengan menggunakan media sosial akan semakin memperluas jangkauan dari penyuluhan yang dilakukan, dan ini tentu akan menambah kepuasan kerja dari Penyuluh Antikorupsi. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara sarana pendukung teknologi informasi terhadap kepuasan kerja. Dengan adanya Penyuluh Antikorupsi ini diharapkan tentunya bisa menaikkan nilai indeks persepsi korupsi di Indonesia (Harjanto et al., 2020). Peningkatan indeks persepsi korupsi ini sangat penting bagi negara Indonesia. Dalam berbagai jurnal banyak yang mengupas betapa pentingnya persepsi korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara juga diperoleh adanya pengaruh korupsi dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara selama 18 tahun periode penelitian. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial korupsi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Guna meningkatkan pendapatan negara, pajak memegang salah satu peranan penting guna menunjang pemasukan negara (Fajar & Azhar, 2019). Persepsi korupsi masyarakat mempunyai dampak dalam mempengaruhi pembayaran pajak masyarakat. Persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan (Wibisono & Kusuma, 2017). Pernyataan ini juga didukung oleh Rika et al. (2020) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi potensi korupsi juga mempengaruhi daya saing dan kemudahan dalam dunia usaha (Kartika et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi potensi korupsi memiliki hubungan kuat dengan persepsi daya saing dan kemudahan berusaha, tetapi belum memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi (Kennedy, 2017).

Dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat tentunya Penyuluh Antikorupsi memiliki motivasi dalam melakukan pekerjaannya. Motivasi kerja dari Penyuluh Antikorupsi ini menjadi hal menarik untuk diteliti. Mengingat sebagai Penyuluh Antikorupsi yang mendapat sertifikasi dari LSP KPK, Penyuluh Antikorupsi bukanlah secara langsung menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan tak jarang kita jumpai para Penyuluh Antikorupsi ini dalam melaksanakan edukasi dan kampanye pencegahan korupsi sering menggunakan dana pribadi. Motivasi kerja akan berhubungan dengan kinerja. Motivasi kerja yang dimiliki oleh Penyuluh Antikorupsi ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja mereka dalam membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memerangi dan memberantas korupsi, terutama dalam strategi edukasi dan kampanye kepada masyarakat. Banyak penelitian yang mengupas hubungan motivasi kerja dengan kinerja. Terdapat pengaruh positif dan

signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja (Catio & Sunarsi, 2020). Ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap kinerja guru (Alhusaini et al., 2020). Motivasi kerja perlu diperhatikan dan dijaga agar kinerja guru semakin baik (Harefa, 2020). Semakin tinggi motivasi kerja karyawan dalam bekerja maka produktivitas karyawan dalam bekerja akan semakin tinggi pula (Saleh & Utomo, 2018). Maka menjadi hal yang sangat menarik untuk meneliti lebih dalam motivasi kerja Penyuluh Antikorupsi dalam melakukan edukasi dan kampanye mitigasi korupsi. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang ingin dibahas adalah apa dan bagaimana motivasi kerja Penyuluh Antikorupsi?

2. METODE

Bagian metode terdiri dari deskripsi tentang partisipan penelitian, desain, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data dan semuanya disajikan dalam bentuk paragraf. deskripsi elemen metode antara lain:

2.1 Partisipan

Subjek sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Penyuluh Antikorupsi yang telah mendapatkan Sertifikasi dari LSP KPK, dan tentunya bersedia untuk menjadi sumber data dari penelitian ini. Subjek yang akan dijadikan sumber data nantinya akan mewakili karakteristik dari Penyuluh Antikorupsi itu sendiri, yakni (1) terdiri dari laki-laki dan perempuan (2) Subjek memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda (3) Subjek telah mendapatkan sertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi oleh LSP KPK.

2.2 Desain

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif dari transkrip dan rekaman wawancara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini nantinya diharapkan dapat ditemukan data-data yang lebih mendalam yang terkadang tidak dapat dicapai dengan menggunakan metode-metode statistik atau cara lain dengan penghitungan kuantifikasi.

Penelitian ini menggunakan strategi pendekatan fenomenologi yaitu model atau desain dalam penelitian kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi tentang kesadaran dan pengalaman yang ada dalam diri individu tentang suatu fenomena. Model penelitian fenomenologi memfokuskan penelitiannya pada cara-cara individu berinteraksi dengan dunia fenomena.

2.3 Instrumen

Dalam penelitian kualitatif ini peran peneliti adalah sebagai perencana penelitian, pengumpul data, penganalisis data hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Pada penelitian kualitatif peneliti atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, atau dengan kata lain peneliti adalah hal kunci untuk melakukan penelitian. Selain berperan sebagai pengumpul data, penganalisis data hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian, peneliti juga menempatkan dirinya sebagai teman dan rekan diskusi dari subjek yang dijadikan informan. Dengan menempatkan diri sebagai teman dan rekan diskusi dari subjek yang dijadikan informan diharapkan nantinya subjek yang dijadikan informan bisa lebih terbuka dan lebih

detail dalam mengungkap fenomena yang diteliti. Semakin percaya dan terbuka subjek yang dijadikan informan kepada peneliti maka akan didapatkan informasi yang jujur sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh subjek yang menjadi informan tersebut.

Tabel 1. Latar belakang dan karakteristik partisipan penelitian

Subjek	Latar Belakang
Subjek pertama	Pekerjaan mahasiswa Jenis kelamin laki - laki Umur 21 tahun Sertifikasi dari LSP KPK Saat ini masih kuliah
Subjek kedua	Pekerjaan ibu rumah tangga Jenis kelamin perempuan Umur 39 tahun Sertifikasi LSP KPK Pendidikan terakhir Sarjana
Subjek ketiga	Pegawai negeri sipil Jenis kelamin laki-laki Umur 42 tahun Sertifikasi LSP KPK Pendidikan terakhir Sarjana
Subjek keempat	Pegawai negeri sipil Jenis kelamin perempuan Umur 46 tahun Sertifikasi LSP KPK Pendidikan terakhir sarjana
Subjek kelima	Pegawai swasta Jenis kelamin laki - laki Umur 41 tahun Sertifikasi LSP KPK Pendidikan terakhir sarjana

2.4 Prosedur

Pengumpulan data merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan informasi-informasi yang berguna dalam penelitian ini. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan (1) Wawancara, dilakukan secara langsung dan juga dengan menggunakan media berupa telepon. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan panduan pedoman umum yang terlebih dahulu dibuat oleh peneliti. Pedoman umum ini berisikan isu-isu dari tema yang dibahas guna menjawab rumusan masalah yang ada. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka. Guna mendapat gambaran yang lebih luas dan rinci dari permasalahan yang dibahas, peneliti sengaja tidak melakukan batasan

pertanyaan yang akan diajukan, pertanyaan dalam wawancara bisa berkembang namun dengan tetap pada isu-isu yang ada dalam tema yang dibahas. Wawancara ini akan diproses dengan transkrip dan dianalisa sehingga menjadi hasil penelitian. (2) Studi dokumentasi, selama proses penelitian, peneliti juga melakukan studi dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini serta dokumen publik lainnya seperti artikel di media, berita dari koran, atau laporan-laporan dari organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

3. HASIL

Dalam penelitian mengungkap sepuluh tema utama yaitu (1) Latar belakang atau kenapa ingin menjadi Penyuluh Antikorupsi, (2) Tujuan menjadi Penyuluh Antikorupsi, (3) Arti penting menjadi Penyuluh Antikorupsi atau makna menjadi Penyuluh Antikorupsi, (4) Kepuasan dengan gaji, yaitu upah yang didapatkan oleh seseorang telah sesuai dengan upaya/usaha yang sudah dilakukan dan sesuai dengan upah yang semestinya diterima oleh orang lain pada posisi kerja yang sama, (5) Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, yaitu ketika pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan kesempatan seseorang untuk mempelajari dan memperoleh suatu tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu dan tantangan untuk pekerjaan yang menarik ini, (6) Kepuasan dengan promosi, yaitu memberikan kesempatan bagi setiap karyawan dengan kesempatan yang sama agar dapat meraih atau mencapai jabatan tertentu yang lebih tinggi, (7) Kepuasan dengan sikap atasan, yaitu sejauh mana sikap atasan mau memberikan kesempatan berupa bantuan secara teknis dan mendukung pekerjaan bawahan, (8) Kepuasan dengan rekan kerja, yaitu rekan kerja dapat memberikan bantuan secara teknis dan mampu secara sosial menjalin hubungan baik, (9) Motivasi melakukan Penyuluhan Antikorupsi, (10) Motivasi dan kinerja Penyuluh Antikorupsi.

Dari data yang dikumpulkan dari subjek, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Pengelompokan jawaban dari isu yang disampaikan kepada subjek akan memudahkan dalam menarik pernyataan yang diberikan oleh masing-masing subjek (lihat tabel 2). Dari sembilan tema utama yang disampaikan kepada subjek, pernyataan dari subjek bisa dijabarkan dengan sub tema yang muncul.

3.1 Latar belakang atau kenapa ingin menjadi Penyuluh Antikorupsi

Ada lima hal yang muncul berkenaan dengan latar belakang atau kenapa ingin menjadi Penyuluh Antikorupsi. Pertama adalah pembelajaran diri, hal ini terungkap dari pernyataan dari subjek pertama yakni “...menjadi Penyuluh Antikorupsi merupakan salah satu cara guna belajar dari realita kehidupan sehari-hari terutama dalam hal tindak pidana korupsi dan bagaimana melakukan pemberantasan korupsi terutama melalui edukasi dan kampanye...”. Kedua adalah pembelajaran diri, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh subjek keempat “...menjaga agar negeri ini tidak terus dihantui dengan tindakan korupsi memerlukan upaya bersama. Untuk itu pilihan menjadi Penyuluh Antikorupsi adalah salah satu cara yang dia lakukan guna mengambil peran bersama pemberantasan korupsi di negeri ini...”. Ketiga adalah penanaman nilai-nilai antikorupsi atau nilai-nilai integritas, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh subjek kedua “...dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi minimal bisa

menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada anak yang dimilikinya serta berupaya untuk menjaga keluarganya dari tindakan dan perilaku korupsi...” pernyataan ini juga didukung oleh subjek ketiga yang menyatakan “... *penanaman nilai-nilai antikorupsi itu sangat penting mas, apalagi bagi saya yang saat ini sebagai pegawai negeri, ini penting bagi saya...*”. Keempat yakni contoh bagi rekan kerja dan masyarakat hal ini seperti yang disampaikan oleh subjek ketiga “...*sebagai Pegawai Negeri Sipil godaan untuk melakukan tindakan korupsi sangatlah besar, dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi saya berharap bisa menjadi pagar bagi diri saya pribadi untuk tidak ikut serta melakukan tindakan korupsi, sehingga nantinya bisa menjadi contoh bagi rekan kerja saya dan masyarakat umum mas...*”. Kelima adalah adanya pengalaman buruk pelayanan publik akibat perilaku korupsi, ini seperti apa yang dikatakan oleh subjek kelima “... *Korupsi ini memang luar biasa sekarang, menjadi Penyuluh Antikorupsi berawal dari pengalaman pribadi saya ketika mengakses pelayanan publik. Benar – benar buruk, saya di minta uang yang seharusnya tidak saya keluarkan untuk mendapatkan surat dari kantor kelurahan, luar biasa memang, sampai tingkat kelurahan pun sudah menjadi hal yang biasa melakukan pungutan liar ini...*”

3.2 Tujuan menjadi Penyuluh Antikorupsi

Ada tiga hal yang bisa dijelaskan mengenai tujuan subjek menjadi Penyuluh Antikorupsi. Pertama adalah melakukan edukasi dan kampanye bahaya korupsi. Hal ini dijelaskan oleh subjek pertama yang mengatakan “...*sebagai mahasiswa sudah menjadi kewajiban saya untuk ikut serta melakukan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi. Dengan mengertinya masyarakat terhadap bahaya korupsi nantinya diharapkan masyarakat bisa sadar untuk tidak ikut serta dalam tindakan dan perilaku korupsi...*”. Hal senada juga terlihat dari pernyataan subjek keempat yang mengatakan “...*tujuan saya menjadi Penyuluh Antikorupsi adalah untuk menjadi bagian dari gerakan bersama memberikan penyadaran kepada masyarakat umum tentang bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai Antikorupsi...*”. Begitu juga dengan informan kelima yang menyatakan “...*dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi saya mempunyai tujuan bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya untuk peduli terhadap isu korupsi ini, sehingga masyarakat sadar akan bahaya korupsi...*”. Kedua yakni menyebarkan nilai-nilai antikorupsi, hal ini sesuai dengan pernyataan subjek kedua yakni “...*menjadi kewajiban saya sebagai ibu untuk memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak-anak, dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi ini saya bertujuan agar bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak saya dan kepada anak-anak lain, sehingga mereka bisa menjadi generasi penerus yang mempunyai mental antikorupsi...*”. Tujuan untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi juga dinyatakan oleh subjek ketiga “...*bisa menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada rekan kerja di mana saya bekerja...*”. Hal senada juga disampaikan oleh subjek kelima “...*disamping itu dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi saya bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah...*”. Sedangkan tujuan ketiga yakni agar tidak ikut dalam melakukan tindakan korupsi, hal ini dikatakan oleh subjek ketiga yang mengatakan “...*dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi saya bisa menjaga diri saya pribadi untuk tidak melakukan tindakan korupsi...*”

Tabel 2. Tema utama dan sub tema

Tema Utama	Sub Tema
Latar belakang atau kenapa ingin menjadi Penyuluh Antikorupsi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembelajaran diri ● Pemberantasan korupsi ● Penanaman nilai-nilai antikorupsi/nilai-nilai integritas ● Contoh bagi rekan kerja dan masyarakat ● Pengalaman buruknya pelayanan publik akibat perilaku korupsi
Tujuan menjadi Penyuluh Antikorupsi	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan edukasi dan kampanye bahaya korupsi ● Menyebarkan nilai-nilai antikorupsi/nilai-nilai integritas ● Agar tidak ikut dalam melakukan tindakan korupsi
Arti penting menjadi Penyuluh Antikorupsi atau makna menjadi Penyuluh Antikorupsi	<ul style="list-style-type: none"> ● Menjadi bagian dari gerakan edukasi bahaya korupsi ● Menyebarkan nilai-nilai antikorupsi/nilai-nilai integritas
Kepuasan dengan gaji	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak ada gaji
Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri	<ul style="list-style-type: none"> ● Puas dengan aktivitas yang dilakukan sebagai Penyuluh Antikorupsi ● Belum puas dengan dampak dari kegiatan penyuluhan ● Antikorupsi
Kepuasan dengan promosi	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak ada pengaruh dengan promosi pada jabatan tertentu ● Secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap promosi jabatan
Kepuasan dengan sikap atasan	<ul style="list-style-type: none"> ● Atasan bersikap biasa saja ● Belum puas dengan sikap atasan ● Atasan memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas sebagai Penyuluh ● Antikorupsi
Kepuasan dengan rekan kerja	<ul style="list-style-type: none"> ● Rekan kerja bersikap biasa saja ● Rekan kerja membantu dalam aktivitas sebagai Penyuluh Antikorupsi ● Adanya sikap sinis dari rekan kerja
Motivasi melakukan penyuluhan antikorupsi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemberantasan korupsi ● Nilai-nilai antikorupsi/nilai-nilai integritas bisa tertanam pada masyarakat dan generasi penerus ● Pelayanan publik yang mudah dan berkualitas bagi masyarakat
Motivasi dan kinerja Penyuluh Antikorupsi	<ul style="list-style-type: none"> ● Motivasi memberikan dampak kepada kinerja Penyuluh Antikorupsi

3.3 Arti penting menjadi Penyuluh Antikorupsi atau makna menjadi Penyuluh Antikorupsi

Penyuluh Antikorupsi ada 2 (dua) hal. Pertama yakni menjadi bagian dari gerakan edukasi bahaya korupsi, hal ini dikatakan oleh subjek pertama “...*menjadi Penyuluh Antikorupsi berarti menjadi bagian dari orang-orang yang sadar akan pentingnya menyadarkan masyarakat tentang bahaya korupsi bagi negeri ini...*”. Subjek keempat yang menyatakan “...*dengan*

menjadi Penyuluh Antikorupsi dia sudah ikut mengambil bagian dalam penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya upaya bersama memberantas korupsi dan bahaya korupsi...”. Kedua yakni menyebarkan nilai-nilai antikorupsi atau nilai-nilai integritas, hal ini sesuai dengan pernyataan subjek ketiga yang menyatakan “...ketika Pegawai Negeri Sipil menjadi pribadi yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai integritas maka negeri ini akan selangkah lebih dekat menuju kesejahteraan, dan saya bangga menjadi salah satu dari kelompok yang terus mengupayakan penyadaran kepada Pegawai Negeri Sipil tentang nilai-nilai integritas tersebut...”. Subjek kedua juga menyatakan “...makna menjadi Penyuluh Antikorupsi adalah ketika apa yang saya lakukan bisa menjadi sedikit atau banyak untuk menjadikan anak-anak mempunyai nilai-nilai integritas, sehingga bisa menjadi generasi yang antikorupsi...”. Serta subjek kelima yang menyatakan “...dengan menjadi penyuluh antikorupsi saya akan berusaha untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat, dan ini menjadi kepuasan tersendiri bagi diri saya ketika masyarakat mengerti dan paham tentang pentingnya nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani...”.

Kepuasan dengan gaji, yaitu upah yang didapatkan oleh seseorang telah sesuai dengan upaya/usaha yang sudah dilakukan dan sesuai dengan upah yang semestinya diterima oleh orang lain pada posisi kerja yang sama. Berkenaan dengan hal ini, semua subjek menyatakan bahwa menjadi penyuluh antikorupsi tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Subjek pertama menyatakan “...menjadi Penyuluh Antikorupsi tidak mendapatkan upah oleh negara. Namun bila negara memberikan perhatian dengan adanya insentif untuk Penyuluh Antikorupsi yang telah mendapatkan sertifikasi oleh LSP KPK tentunya semakin memacu apa yang saat ini saya lakukan...” Subjek Kedua menyatakan “... menjadi Penyuluh Antikorupsi berawal dari niat ikhlas karena memang tidak ada gaji bulanan resmi yang diberikan oleh negara secara langsung kepada Penyuluh Antikorupsi...”. Subjek Ketiga menyatakan “...tidak ada gaji khusus sebagai Penyuluh Antikorupsi. Sebagai Pegawai Negeri Sipil saya mendapatkan gaji dari status saya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, namun kadang bila mendapatkan tugas untuk memberikan Penyuluhan Anti Korupsi terkadang saya mendapatkan uang transportasi...” Subjek keempat menyatakan “... selama ini saya tidak pernah mendapat gaji secara khusus sebagai Penyuluh Antikorupsi...” Subjek kelima menyatakan “...dari awal saya sudah mengetahui kalau sampai dengan saat ini tidak ada gaji khusus sebagai Penyuluh Antikorupsi...”

Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, yaitu ketika pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan kesempatan seseorang untuk mempelajari dan memperoleh suatu tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu dan tantangan untuk pekerjaan yang menarik ini. Ada dua hal yang terungkap dalam penelitian ini berkenaan dengan kepuasan dengan pekerjaan yang subjek lakukan sebagai Penyuluh Antikorupsi. Pertama adalah puas dengan aktivitas yang dilakukan sebagai Penyuluh Antikorupsi, hal ini dinyatakan oleh Subjek pertama yang berkata “...selama ini saya puas dengan apa yang saya lakukan sebagai Penyuluh Antikorupsi...”. Subjek kedua mengatakan “...saya bersyukur bisa menjadi Penyuluh Antikorupsi, sehingga bisa menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tantangan dari pekerjaan ini adalah mengubah persepsi masyarakat bahwa korupsi sudah terlalu susah untuk diberantas. Untuk itu saya lebih memilih memberikan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak dengan harapan ketika sudah menjadi dewasa

nantinya bisa menjadi pribadi yang memiliki mental antikorupsi...”. Subjek ketiga menyatakan “... sampai dengan saat ini saya merasa puas bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya korupsi dan menanamkan nilai-nilai Integritas kepada masyarakat dan rekan-rekan kerja saya...”. Subjek keempat mengatakan “... untuk pekerjaan yang saya lakukan sebagai Penyuluh Antikorupsi saya puas melakukan itu semua...” Hal kedua adalah belum puas dengan dampak dari kegiatan penyuluhan anti korupsi, ini sesuai dengan pernyataan subjek keempat yang berkata “... namun dampak dari penyuluhan yang saya lakukan saya belum puas...”. Juga perkataan subjek kelima “...kepuasan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai Penyuluh Antikorupsi relatif, artinya terkadang saya puas dengan apa yang telah saya lakukan namun dampak dari yang saya dan teman-teman lakukan belum memuaskan, kadang masih kurang puas melihat keadaan di masyarakat yang masih sering saya jumpai melakukan perilaku dan tindakan korupsi...”

Kepuasan dengan promosi, yaitu memberikan kesempatan bagi setiap karyawan dengan kesempatan yang sama agar dapat meraih atau mencapai jabatan tertentu yang lebih tinggi. Dari pernyataan subjek, ada dua hal yang tertangkap berkenaan dengan kepuasan promosi ini, pertama adalah tidak ada pengaruh dengan promosi pada jabatan tertentu, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh subjek pertama “...saat ini sebagai mahasiswa tentu... aktivitas saya sebagai Penyuluh Antikorupsi, tidaklah memberikan pengaruh terhadap jenjang jabatan bagi diri saya...”. Subjek kedua menyatakan “...sebagai Ibu Rumah Tangga tentunya tidak memberi pengaruh aktivitas saya sebagai Penyuluh Antikorupsi dengan jenjang jabatan yang ada pada diri saya ,he,he,he...”. Subjek keempat menyatakan “...menjadi Penyuluh Antikorupsi tidaklah memberikan pengaruh kepada jenjang jabatan yang ada pada pekerjaan yang saya miliki saat ini...”.Subjek kelima juga menyatakan hal yang serupa yakni “...apa yang saya lakukan sebagai Penyuluh Antikorupsi dalam memberikan edukasi dan kampanye kepada masyarakat tidak mempengaruhi jenjang jabatan yang ada pada pekerjaan yang saya jalani saat ini...”. Hal kedua adalah secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap promosi jabatan, ini sesuai dengan perkataan subjek ketiga yakni “...namun aktivitas saya yang saat ini memberikan Penyuluhan Anti Korupsi kepada masyarakat dan rekan-rekan kerja saya membuat saya lebih dikenal oleh atasan dan ini secara tidak langsung memberikan dampak kepada jenjang jabatan pada pekerjaan yang saya lakukan...”.

Kepuasan dengan sikap atasan, yaitu sejauh mana sikap atasan mau memberikan kesempatan berupa bantuan secara teknis dan mendukung pekerjaan bawahan. Berkenaan dengan kepuasan terhadap sikap atasan, ada tiga hal yang diungkapkan oleh subjek yakni pertama atasan bersikap biasa saja, hal ini sesuai dengan perkataan subjek kelima yaitu “... atasan saya bersikap biasa saja dengan apa yang saya lakukan sebagai Penyuluh Antikorupsi...”. Hal kedua adalah belum puas dengan sikap atasan, ini sesuai dengan perkataan subjek keempat yang berkata “...terus terang sebenarnya saya belum puas terhadap sikap atasan dalam mendukung upaya saya sebagai penyuluh antikorupsi...”. Ketiga adalah atasan memberi kesempatan untuk melakukan aktivitas sebagai Penyuluh Antikorupsi, ini sesuai dengan pernyataan subjek ketiga yakni “...saat ini atasan memberikan kesempatan kepada diri saya untuk melakukan aktivitasnya sebagai Penyuluh Antikorupsi, namun dukungan penuh seperti program khusus guna melakukan Penyuluhan Antikorupsi dari instansi di mana saat ini saya bekerja belum ada...”.

Kepuasan dengan rekan kerja, yaitu rekan kerja dapat memberikan bantuan secara teknis dan mampu secara sosial menjalin hubungan baik. Pada tema kepuasan dengan rekan kerja dapat terungkap tiga hal yang ada dalam penelitian ini, pertama rekan kerja bersikap biasa saja. Ini bisa terlihat dari pernyataan subjek keempat yang menyatakan “...rekan kerja di mana saya bekerja sebagian bersikap biasa saja dengan aktivitas saya sebagai Penyuluh Antikorupsi...”. Kedua rekan kerja membantu dalam aktivitas sebagai Penyuluh Antikorupsi. Ini terlihat dari pernyataan subjek pertama yang berkata “...rekan-rekan saya sesama Penyuluh Antikorupsi selalu saling memberikan support dalam melakukan Edukasi dan Kampanye kepada masyarakat. Melalui komunitas yang dibangun bersama rekan-rekan sesama Penyuluh Antikorupsi saling memberikan masukan dan koreksi terhadap kegiatan yang dilakukan. Begitu juga dengan rekan-rekan sesama mahasiswa, mereka juga memberikan bantuan kepada saya ketika memerlukan bantuan guna melakukan kegiatan Penyuluhan Anti Korupsi...”. Pernyataan subjek kedua “...rekan-rekan sesama Penyuluh Anti Korupsi memberikan dukungan kepada saya dengan apa yang saya lakukan sebagai Penyuluh Antikorupsi. Dukungan ini berupa materi-materi Penyuluhan Antikorupsi dan saling memberikan semangat dalam melakukan Penyuluhan kepada masyarakat. Dari KPK sendiri melalui Pusat Edukasi Anti Korupsi memberikan dukungan kepada setiap Penyuluh Antikorupsi dalam melakukan edukasi dan kampanye kepada masyarakat tentang bahaya korupsi...”. Pernyataan subjek ketiga “...untuk rekan kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil kadang memberikan bantuan kepada saya dalam melakukan Penyuluhan Antikorupsi...”. Pernyataan subjek keempat “...sesama Penyuluh Antikorupsi saling memberikan support dan bantuan dalam melakukan Penyuluhan Anti Korupsi kepada masyarakat...” Begitu juga dengan pernyataan subjek kelima yang menyatakan “...untuk rekan kerja di mana saya bekerja saat ini sering membantu saya dalam melakukan kegiatan yang saya lakukan ketika memberikan Penyuluhan Anti Korupsi kepada masyarakat. Sering rekan kerja saya menemani ketika melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau kepada anak-anak sekolah. Untuk sesama Penyuluh Antikorupsi tentunya saling mendukung dan mensupport, sering berbagai materi dalam memberikan penyuluhan dan saling memberikan solusi bila ada permasalahan ketika melakukan Penyuluhan Antikorupsi...”. Hal yang ketiga adalah adanya sikap sinis dari rekan kerja, hal ini sesuai dengan pernyataan subjek ketiga yang berkata “...ada kalanya saya juga mendapat pandangan yang kurang baik atau terkesan sinis dari rekan kerjanya sesama Pegawai Negeri Sipil.... Ya dibilang sok bersih gitu...”.

3.4 Motivasi melakukan Penyuluhan Anti Korupsi

Dalam penelitian ini terungkap ada tiga hal berkenaan dengan motivasi subjek dalam melakukan penyuluhan korupsi. Pertama adalah pemberantasan korupsi, hal ini tercermin dari pernyataan subjek pertama yang berkata “...motivasi saya melakukan Penyuluhan Anti Korupsi adalah adanya harapan saya negara ini bisa lebih baik lagi kedepannya, karena saya yakin bila tindakan korupsi bisa dicegah maka potensi negara ini untuk maju sangatlah luar biasa.... Dan ini tentunya akan menjadikan negara ini bisa semakin memperhatikan kesejahteraan warganya...”. Pernyataan subjek keempat “...kesejahteraan masyarakat bisa dicapai bila korupsi bisa diberantas di negeri ini, untuk itu saya terus termotivasi melakukan Penyuluhan Kepada masyarakat tentang Anti Korupsi...”. Kedua adalah nilai-nilai antikorupsi atau nilai-nilai integritas bisa tertanam pada masyarakat dan generasi penerus, hal ini sesuai dengan

pernyataan subjek kedua yang berkata “...saya akan berusaha terus untuk melakukan Penyuluhan Anti Korupsi terutama dalam hal menanamkan nilai-nilai integritas yang merupakan nilai-nilai Anti Korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa... ini sebagai upaya saya, ... sehingga kedepan anak-anak ini bisa memiliki mental dan perilaku yang baik...”. Pernyataan subjek ketiga “...keinginan untuk melihat Pegawai Negeri Sipil melakukan pekerjaannya dengan baik dan mempunyai integritas adalah motivasi saya dalam menjalankan aktivitas sebagai Penyuluh Antikorupsi...”. Ketiga adalah pelayanan publik yang mudah dan berkualitas bagi masyarakat hal ini sesuai dengan pernyataan subjek kelima yang berkata “...keinginan adanya pelayanan publik yang mudah dan berkualitas bagi warga negara, tercukupinya fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah hal yang menjadi impian saya, dan itu semua salah satunya bisa terjadi bila kita bisa memberantas perilaku dan tindakan korupsi yang ada di negeri ini. Untuk itu proses penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas harus dilakukan secara bersama-sama. Ini adalah motivasi saya ketika melakukan penyuluhan antikorupsi...”.

3.5 Motivasi dan kinerja Penyuluh Antikorupsi

Pada penelitian ini seluruh subjek menyatakan bahwa motivasi memberikan dampak kepada kinerja Penyuluh Antikorupsi. Subjek pertama berkata “... tentunya motivasi yang ada pada diri saya akan mempengaruhi saya dalam melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi...”. Subjek kedua menyatakan “...ketika motivasi kuat otomatis dalam melakukan kegiatan penyuluhan juga semangat...”. Subjek ketiga berkata “...dorongan atau motivasi yang ada pada diri saya sangat mempengaruhi saya dalam melakukan penyuluhan...”. Subjek keempat yang berkata “...saya menjadi merasa memiliki kekuatan lebih dalam melakukan penyuluhan karena motivasi yang saya miliki...”. Subjek kelima yang berkata “...motivasi ini sangat penting dalam mempengaruhi saya ketika melakukan penyuluhan anti korupsi...”.

4. DISKUSI

Motivasi kerja Penyuluh Antikorupsi berasal dari internal dan eksternal. Hal ini sesuai dengan yang penelitian Kurniawan (2021) yang menyatakan ada dua dimensi dari motivasi yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal yang ada antara lain melakukan pembelajaran terhadap diri sendiri sehingga bisa menghindarkan dari perilaku korupsi, keinginan untuk terhindar dari perilaku korupsi, kesadaran bahaya korupsi, keinginan untuk menanamkan nilai-nilai integritas pada anak-anak, keinginan untuk menjadi teladan bagi rekan kerja serta kepuasan dari apa yang dilakukan sebagai Penyuluh Antikorupsi (Potu et al., 2021). Sedangkan motivasi eksternal yang ada antara lain keinginan pelayanan publik yang lebih berkualitas, bantuan dan support dari atasan dan rekan kerja. Sementara itu gaji dan jabatan bukanlah motivasi bagi Penyuluh Antikorupsi dalam menjalankan kegiatannya.

Dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi maka akan bisa melakukan pembelajaran terhadap diri sendiri sehingga bisa menghindarkan dari perilaku korupsi, lingkungan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan yang terbiasa dalam melakukan tindakan dan perilaku korupsi tentu sedikit banyak akan mempengaruhi seseorang dalam

menjalani aktivitasnya. Dalam beberapa jenis pekerjaan lingkungan yang ada sangat memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Pengetahuan yang dimiliki sebagai Penyuluh Antikorupsi tentunya akan mempengaruhi Penyuluh Antikorupsi tersebut dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Dalam menjalankan pekerjaan misalnya, dengan pengetahuan yang dimilikinya Penyuluh Antikorupsi tentu akan lebih berhati-hati dalam berperilaku. Nilai-nilai integritas sebagai cerminan perilaku yang dipegang seorang Penyuluh Anti Korupsi akan menjadi pagar bagi dirinya sehingga tidak terperosok dalam tindakan korupsi.

Kesadaran akan bahaya korupsi sehingga muncul keinginan untuk menjadi bagian dari gerakan pemberantasan korupsi. Informasi dari berbagai media yang ada tentang kasus-kasus korupsi menjadi bahan renungan bagi masyarakat umum khususnya para Penyuluh Antikorupsi. Nilai indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih dikatakan belum baik menjadi cermin bahwa tindakan korupsi di Indonesia masih banyak terjadi. Dampak dari adanya praktek korupsi ini tentunya akan memengaruhi perjalanan masyarakat yang ada di Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari temuan kasus-kasus korupsi. Bila situasi ini terus dibiarkan tentunya akan semakin berdampak tidak baik bagi perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Berawal dari kesadaran akan dampak dari korupsi ini, menjadikan Penyuluh Antikorupsi untuk bertekad mengambil peran dari proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya Penyuluh Antikorupsi melakukan edukasi dan kampanye dari bahaya korupsi kepada masyarakat umum, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang sadar dan peduli bahayanya tindakan korupsi. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi, nantinya diharapkan akan semakin besar jumlah orang-orang yang ikut mengambil bagian dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keinginan dari dalam diri untuk menanamkan nilai-nilai integritas atau nilai-nilai Antikorupsi kepada masyarakat. Ada 9 (sembilan) nilai-nilai integritas yang juga dijadikan sebagai nilai-nilai antikorupsi, yakni ; berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab dan sederhana. Dengan menyebarkan nilai-nilai ini kepada masyarakat dan diharapkan nantinya bisa tertanam dalam perilaku keseharian yang ada maka akan tercipta masyarakat yang tidak melakukan tindakan dan perilaku korupsi. Penyuluh Antikorupsi sadar bahwa proses untuk menanamkan nilai-nilai integritas. Nilai-nilai antikorupsi ini memerlukan waktu yang tidak singkat, maka ini menjadi salah satu motivasi mereka untuk terus melakukan edukasi dan kampanye kepada masyarakat terutama kepada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrajaya et al. (2021).

Ingin menjadi teladan atau contoh bagi rekan kerja dan masyarakat pada umumnya dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas. Dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi maka kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan nilai integritas atau nilai-nilai antikorupsi dalam menjalankan aktivitas keseharian, tentunya akan menjadi contoh atau teladan bagi rekan kerja atau masyarakat pada umumnya. Dengan memberikan contoh yang baik berupa perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai integritas diharapkan lingkungan tempat dia berada bisa menjadi sebuah lingkungan yang manusianya bisa menerapkan nilai-nilai integritas dalam

kesehariannya. Berkenaan dengan pentingnya keteladanan dalam memberikan contoh kepada orang lain ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marliu et al. (2020).

Kepuasan dari apa yang dilakukannya sebagai Penyuluh Antikorupsi kepuasan dalam menjalankan aktivitas merupakan hal yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam menjalankan aktivitasnya. Bagi para Penyuluh Antikorupsi mereka mempunyai kepuasan tersendiri ketika melakukan aktivitasnya sebagai Penyuluh Antikorupsi. Keyakinan yang dimiliki oleh Penyuluh Antikorupsi bahwa dalam menjalankan aktivitasnya, mereka sedang melakukan pekerjaan yang mempunyai dampak kebaikan kepada masyarakat menjadikan mereka puas dalam melakukan Penyuluhan Anti Korupsi kepada masyarakat. Hubungan motivasi kerja dan kepuasan kerja juga dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Muhdi (2020).

Keinginan pelayan publik yang baik dan berkualitas. Masih banyaknya pelayanan publik yang tidak baik dan seringkali terjadi tindakan korupsi pada aktivitas pelayanan publik menjadi salah satu hal yang menyebabkan Penyuluh Antikorupsi ini termotivasi dalam melakukan aktivitasnya. Perilaku oknum Pejabat dan oknum Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pelayan publik yang sering melakukan tindakan korupsi adalah hal yang tidak baik dan tidak pantas dilakukan. Untuk itu Penyuluh Anti korupsi berusaha untuk memberikan edukasi dan kampanye kepada masyarakat dan tentunya termasuk di dalamnya adalah Pegawai Negeri Sipil bahwa pelayanan publik adalah hak dari warga negara, untuk itu kegiatan pelayanan publik haruslah berjalan dengan baik dan jauh dari tindakan korupsi.

Bantuan dan support dari atasan dan rekan kerja. Dukungan dari orang-orang yang ada disekitar kita tentunya akan membuat kita semakin termotivasi dalam menjalankan aktivitas kita. Begitu juga dengan aktivitas Penyuluh Antikorupsi, adanya dukungan dan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka tentunya akan menjadi motivasi untuk terus memberikan Penyuluhan Anti Korupsi kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya Penyuluh Antikorupsi sering mendapat bantuan dan support dari rekan kerja serta atasannya. Namun tak jarang juga dijumpai adanya rekan kerja yang sinis dan atasan yang tidak bekerjasama kepada Penyuluh Antikorupsi. Sedikit banyak adanya sikap negatif dari rekan kerja dan atasan di tempat dia bekerja ini tentunya mempunyai pengaruh terhadap motivasi Penyuluh Antikorupsi dalam menjalankan kegiatannya. Namun adanya dukungan dan bantuan dari sesama Penyuluh Antikorupsi serta keinginan untuk menjadikan lingkungan tempat dia beraktivitas bisa memiliki sikap yang sama guna melakukan pemberantasan korupsi menjadi motivasi bagi Penyuluh Antikorupsi. Selain adanya dukungan dari sesama Penyuluh Antikorupsi, dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK menjadi motivasi untuk mereka dalam melakukan edukasi dan kampanye kepada masyarakat. Berkenaan dengan pengaruh dukungan atasan terhadap motivasi (Senen et al., 2021). Sementara itu pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiryawan et al. (2020).

Gaji dan pengaruh jabatan sebagai Penyuluh Antikorupsi, mereka sadar bahwa tidak ada gaji khusus sebagai Penyuluh Antikorupsi. Dari awal para Penyuluh Antikorupsi ini mengetahui bahwa mereka tidak mendapat gaji khusus dari statusnya sebagai Penyuluh Antikorupsi. Hal yang menjadi menarik di sini adalah biasanya orang melakukan sebuah

pekerjaan mengharapkan gaji atau pendapatan, namun bagi Penyuluh Antikorupsi dari awal mereka sadar bahwa menjadi Penyuluh Antikorupsi tidak mendapatkan gaji resmi dari pemerintah. Meskipun status mereka sudah mendapat sertifikasi dari LSP KPK, dalam hal jabatan di tempat kerja, status mereka sebagai Penyuluh Antikorupsi tidaklah memberikan efek secara langsung guna peningkatan karir mereka ditempat kerja. Namun dijumpai juga status sebagai Penyuluh Antikorupsi membuat atasan mereka lebih memperhatikan Penyuluh Anti korupsi tersebut.

Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa motivasi yang dimiliki oleh Penyuluh Antikorupsi dalam menjalankan aktivitasnya berhubungan dengan kinerja mereka. Berbagai motivasi yang mereka miliki semakin menambah semangat Penyuluh Antikorupsi dalam melakukan pendidikan dan kampanye kepada masyarakat umum tentang bahaya korupsi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua jenis motivasi kerja yang dimiliki oleh Penyuluh Antikorupsi yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Untuk motivasi internal diantaranya yaitu pembelajaran diri, kesadaran akan bahayanya tindak korupsi, keinginan menanamkan nilai-nilai integritas, keinginan meningkatkan pelayanan public menjadi lebih baik, keinginan untuk menjadi teladan bagi rekan kerja dan masyarakat sekitar, serta kepuasan melakukan Penyuluhan Antikorupsi. Sedangkan untuk motivasi eksternal diantaranya yaitu bantuan dan dukungan dari rekan kerja serta atasan, maraknya kasus korupsi, dan dukungan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

REFERENSI

- Alhusaini, A., Kristiawan, M., & Eddy, S. (2020). Pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(3), 2166–2172.
- Anjari, W. (2015). Pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 23-44.
- Catio, M., & Sunarsi, D. (2020). Analisa pengaruh kompetensi, disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja guru (SMK Sasmita Jaya 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan). *Equilibrium: Jurnal Pelatihan Pendidikan dan Ekonomi*, 17(02), 16–26.
- Fajar, M., & Azhar, Z. (2019). Indeks persepsi korupsi dan pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara asia tenggara. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 681–690.
- Guntara, B. (2020). Maraknya korupsi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 11–24.
- Hakim, A. R., & Muhdi, M. (2020). Motivasi kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja guru SMK swasta di wilayah timur Kabupaten Pematang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2), 105–115.
- Harefa, D. (2020). Pengaruh persepsi guru IPA fisika atas lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 112–112.

- Harjanto, H., Widjajanti, K., & Sugiarti, L. R. (2020). Sarana teknologi dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dimediasi sistem informasi. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(3), 212.
- Indrajaya, A. N., Susanti, Y. F., Eddywidjaja, R., Heryudi, H., Setianto, C., & Juliana, J. (2021). Menumbuhkan integritas melalui karakter anti korupsi untuk mempersiapkan remaja menjadi agen perubahan. *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)*, 3(1), 11–20.
- Joniarta, I. W. (2018). Banalitas korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 149-56.
- Kadir, Y., & Bunga, M. (2020). Pencegahan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 153-161.
- Kartika, R., Jefri, U., & Suhartati, F. (2020). Pengaruh persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Cilegon. *Jurnal Rekaman*, 4(1), 126–134.
- Kennedy, P. S. J. (2017). Hubungan persepsi potensi korupsi, daya saing dan kemudahan berusaha serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi daerah (analisa data dari survei persepsi korupsi). *Ikraith-Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 53–60.
- Kurniawan, A. W. (2021). Pengaruh faktor motivasi internal dan eksternal terhadap prestasi kerja karyawan: Sebuah studi kuantitatif. *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 5(1), 260-277.
- Marliu, F., Surasman, O., & Taufan, T. (2020). Keteladanan guru dan pendidikan dalam keluarga terhadap kepribadian muslim siswa di MTS pondok pesantren Al-Husainy Kota Bima. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 4(1), 29–40.
- Potu, J., Lengkong, V. P. K., & Trang, I. (2021). Pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan pada PT. Air Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 387–394.
- Pustha, F. W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580-585.
- Saleh, A. R., & Utomo, H. (2018). Pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, etos kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT. Inko Java Semarang. *Among Makarti*, 11(1), 28–50.
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi dan mentalitas: Kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 27(4), 173-183.
- Senen, S., Krisnaldy, K., & Ishak, G. (2021). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi (Studi kasus Yayasan Nurul Ihsan). *Jurnal Arastirma*, 1(1), 165–172.
- Sugiarti, R., Suhariadi, F., & Erlangga, E. (2018). The chance of gifted intelligent students' success in career. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 9(9), 277–281.
- Taja, N., & Aziz, H. (2017). Mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 39–52.

- Wibisono, A. F., & Kusuma N., Y. C. (2017). Analisis persepsi korupsi pajak dan iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 4(2), 169–180.
- Wirawan, T., Risqon, R., & Noncik, N. (2020). Pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi dan disiplin serta dampaknya pada kinerja. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 1(01), 59–78.
- Zuber, A. (2018). Strategi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178-190.